



**Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan dan Eksploitasi  
(Kajian Kasus di Perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat)**

Oleh

**Rupita**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

[rupita\\_iin@yahoo.co.id](mailto:rupita_iin@yahoo.co.id)

---

**Keywords:**

*Women,  
Border,  
Poverty,  
Exploitation*

---

---

**Abstract**

*As the situation of poverty in various parts of the world, as well as experienced by the border women who settled in the border area of Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Regency of Bengkayang West Kalimantan. Poverty and exploitation seem inseparable from the life of women at the border. In this situation they are the most neglected victims. This paper uses a descriptive analysis approach in data management and field findings. The findings of this writing tell the lives of women living in the frontier, where the lives of those who are poor often become victims of exploitation.*

---

---

**Kata kunci:**

*Perempuan,  
Perbatasan,  
Kemiskinan,  
Eksploitasi*

---

---

**Abstrak**

Sebagaimana situasi kemiskinan di berbagai belahan dunia, begitu pula lah yang dialami oleh perempuan-perempuan perbatasan yang bermukim di wilayah perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Kemiskinan dan eksploitasi seolah-olah tak terpisahkan dari kehidupan perempuan di perbatasan. Dalam situasi ini mereka adalah korban yang paling diabaikan. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dalam menyajikan data dan temuan lapangan. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Temuan pada tulisan ini menceritakan kehidupan perempuan yang hidup di wilayah perbatasan, dimana kehidupan mereka yang adalah miskin kerap kali menjadi korban eksploitasi.

---

**Pendahuluan**

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi isu yang berkepanjangan, dimulai semenjak masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa teknologi modern kini. Kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia sudah menjadi isu yang berkepanjangan dimulai semenjak akhir masa orde baru tahun 1997, dimana kondisi ekonomi nasional memburuk (Suyanto, 2001).

Penanganan berarti belum terlihat berdampak pada pengurangan kemiskinan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Hal ini dikarenakan program-program yang berasal dari dana APBD menasar tidak tepat sasaran, kemudian dana yang disediakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan masih relatif kecil jika dibandingkan jumlah penduduk miskin (Kertati, 2013).

Kalimantan Barat yang merupakan wilayah strategis persinggahan antar negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. Namun, wilayah beranda negara masih jauh tertinggal sumber daya manusianya. Keterbelakangan masyarakat pedalaman yang mendiami area pedesaan ini bukanlah hal baru, sudah banyak kajian yang mencoba mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut (lih. Diamond, 2012; Santoso, 2018).

Isu perempuan erat kaitannya dengan isu kemiskinan. John Friedman (dalam Suyanto, 2013) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Perempuan yang mendiami wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia tidak lepas dari kondisi kehidupan yang miskin dan serba terbatas. Tidak terkecuali kondisi kehidupan perempuan di wilayah perbatasan negara yang merupakan masih pedesaan-pedesaan yang terpencil dan terisolasi. Mereka hidup menyatu dengan alam dan menjadikan alam sebagai sumber penghidupan.

Pembangunan di wilayah perbatasan selama ini pun, lebih menekankan kepada pembangunan ekonomi dan kurang memperhatikan pembangunan manusianya (Niko & Samkamaria, 2019). Sehingga masyarakat lokal yang berada di kawasan perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat aktif dan representatif dalam proses implementasi pembangunan (Rahmaniah, 2014). Sebagai akibatnya masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan masih tetap dalam keadaan miskin dan tetap terpinggirkan. Hal ini dikarenakan pendidikan dan skill yang minim dimiliki masyarakat lokal.

Keterbatasan-keterbatasan tidak hanya melulu persoalan ekonomi semata, melainkan terdapat persoalan yang sudah multidimensional. Bahkan persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan di perbatasan bukan hanya kemiskinan kultural dan struktural saja, tetapi juga menyangkut kemiskinan multidimensi. Dalam konteks ini posisi perempuan sangat rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi, dimana terdapat indikator-indikator seperti; dimensi sosial, pendidikan, kesehatan dan standar kualitas hidup.

Data kemiskinan multidimensional di Kalimantan Barat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 2.060.569 orang berada pada garis kemiskinan, dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4,40 juta orang. Hal ini berarti sebanyak 40,2% penduduk di Kalimantan Barat masih hidup dibawah garis kemiskinan, dimana sebaran penduduk miskin paling banyak di wilayah pedesaan, yaitu sebanyak 1.726.992 orang, selebihnya berada di wilayah perkotaan (Budiantoro, *et.al.*, 2015).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pokok pada masyarakat perbatasan. Hal ini merupakan sebagai akibat dari rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang ada. Data monografi pemerintah Kecamatan Jagoi Babang (dalam Niko, 2016) tercatat bahwa sebanyak 1.537 KK (kepala keluarga) hidup di garis kemiskinan dari jumlah total 1.679 KK di Jagoi Babang. Sebagai sebuah permasalahan sosial, kemiskinan tentu membawa dampak yang lebih luas terlebih bagi perempuan di perbatasan. Tidak jarang mereka mengalami eksploitasi di sektor domestik bahkan menjadi korban perdagangan orang di Malaysia. Melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang kehidupan perempuan di perbatasan yang sangat *friendly* dengan kemiskinan dan eksploitasi.

## **Metode**

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sajian data deskriptif analisis, yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalan, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan pendapat aktor. Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian, serta data sekunder dari pemerintahan daerah Kecamatan Jagoi Babang.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan Dan Eksploitasi**

Kehidupan perempuan di perbatasan Jagoi Babang masih mengandalkan sumber alam sebagai sumber penghasilan utama. Sekitar 90% perempuan yang mendiami wilayah Jagoi adalah perempuan suku Dayak sub-suku Bidayuh dan Bekatik. Seperti yang terlihat, sumber penghidupan mereka yang mendiami wilayah perbatasan Jagoi

Babang berasal dari mata pencaharian sebagai petani padi. Mengikuti nenek moyang mereka jaman dahulu, perempuan Dayak masih menerapkan sistem berladang secara tradisional. Hasil tani yang mereka dapatkan pun hanya untuk keperluan keluarga mereka saja, tidak untuk dijual.

Selain bertani padi mereka juga membudidayakan karet sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka menyebutnya “*mutong’k*” atau berarti menyadap pohon karet kemudian diambil airnya untuk diolah dan dijual sebagai penghasilan ekonomi tambahan. Banyak diantara mereka yang pekerjaannya hanya *mutong’k* untuk menyambung roda perekonomian keluarga mereka. Peran ganda yang dilakoni perempuan perbatasan, selain sebagai ibu bagi anak-anak mereka juga merupakan sebagai penopang ekonomi keluarga. Data demografi kecamatan Jagoi Babang tahun 2013 menunjukkan jumlah perempuan sebanyak 3.323 jiwa dan rata-rata mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Disamping sumber daya pertanian, masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang ini memiliki kerajinan tangan yang unik berupa; bidai, takin, bubu dan masih banyak lagi. Kerajinan tangan ini terbuat dari bahan dasar kulit kayu *Kapua’k* dan rotan, yang kemudian dihasilkan menjadi kerajinan khas oleh perempuan-perempuan di perbatasan untuk dijual di Malaysia. Kerajinan tangan hasil karya mereka itu bernilai jual yang cukup tinggi di negara tetangga. Sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi perempuan yang bekerja sambilan di sektor *home industry*. Namun sungguh disayangkan kerajinan ini belum dikembangkan oleh pemerintah secara maksimal, sehingga produk mereka diperdagangkan sangat terbatas, dan itu pun di Malaysia. Hal ini dikarenakan masih sedikit orang Indonesia yang berminat dengan produk kerajinan ini.

Akses menuju beberapa desa di Jagoi Babang dapat dibilang sangat sulit, seperti Desa Sinar Baru yang tidak memiliki akses jalan darat. Untuk menuju desa ini menggunakan akses lewat sungai dengan waktu tempuh 5-6 jam dengan menggunakan transportasi *speed boat*, tentu dengan harga yang cukup mahal. Tidak ada akses listrik, akses internet di desa tersebut sehingga masyarakat masih hidup dalam keadaan terisolir dari wilayah Indonesia, sementara untuk menuju Malaysia hanya menempuh waktu sekitar 1 jam melewati jalur darat yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai “jalan tikus”.

Apabila dilihat dari sumber perekonomiannya, kehidupan masyarakat terutama perempuan di wilayah perbatasan Jagoi ini masih lemah dan masih berpenghasilan pas-pasan, dalam artian cukup untuk makan sehari-hari saja, walau pada kenyataannya sering kekurangan. Sehingga kehidupan mereka dapat dikategorikan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan yang mereka alami bukan saja dari segi ekonomi (penghasilan), namun lebih kepada kemiskinan yang struktural, dimana mereka tidak memiliki akses untuk bersaing di sektor publik. Oleh karena itu, Soetomo (2010) menyebutkan bahwa pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak perlu melibatkan banyak aspek salah satunya adalah aspek sosiologis, terutama rendahnya akses pelayanan sosial, terbatasnya jaringan interaksi sosial dan terbatasnya penguasaan informasi.

Fenomena kemiskinan juga tergambar dalam keseharian anak-anak di perbatasan negeri. Sebagaimana ditulis dalam website KBAI (Kantor Berita Anak Indonesia) dalam tulisan Niko, menyebutkan bahwa anak-anak bekerja sambilan dari siang hari hingga sore hari (setelah pulang sekolah—bagi mereka yang sekolah pagi). Ada pula yang bekerja dari pagi hingga siang hari (sebelum berangkat sekolah—bagi mereka yang sekolah siang). Jenis pekerjaannya pun bervariasi, ada yang menjadi buruh di sebuah pabrik ekonomi kreatif masyarakat, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penoreh karet atau masyarakat disana menyebutnya “*mutong’k*”. Mereka mencari uang untuk jajan sekolah atau membayar uang sekolah, dan ada pula yang untuk menambah penghasilan orang tuanya, dalam artian membantu perekonomian keluarganya.

Beberapa keluarga, termasuk perempuan, ada yang pulang pergi menjadi tenaga buruh di perusahaan sawit di Malaysia. Mereka pergi pagi, dan pulang di sore hari. Begitu seterusnya setiap hari. Tenaga mereka di bayar murah oleh perusahaan, belum lagi membayar semacam pajak kepada perusahaan, karena mereka bukan warga asli Malaysia. Selain itu banyak anak-anak perempuan yang putus sekolah, kemudian memilih untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di negara Malaysia, bukan melalui jalur resmi melainkan menjadi TKI ilegal yang masuk wilayah Malaysia tanpa dokumen lengkap. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terlibat dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang yang ilegal, karena mereka tidak memiliki *soft skill* untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik. Semua ini merupakan suatu implikasi dari kemiskinan yang membelenggu kehidupan perempuan di perbatasan.

Kenyataan akan banyaknya perempuan di perbatasan yang kemudian memilih untuk menjadi TKW yang ilegal di Malaysia merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan perbatasan (Niko, 2017). Tidak jarang mereka menjadi pelacur di kawasan perusahaan sawit di wilayah Sabah, Malaysia. Dan tidak jarang pula mereka yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga mengalami penyiksaan dari majikan mereka. Sudah menjadi korban praktik *trafficking*, kemudian ditambah lagi menjadi korban penyiksaan bahkan eksploitasi seksual.

Kenyataan yang demikian adanya sungguh memprihatinkan, dan sudah selayaknya kita menghentikannya. Kemiskinan dan eksploitasi terhadap perempuan pedesaan ini akan terus berkelanjutan, sehingga seolah-olah menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada masyarakat di perbatasan; bahwasannya anak perempuan sepatutnya bekerja menjadi TKW di Malaysia untuk meringankan beban ekonomi keluarga mereka.

## **2. Perempuan, Eksploitasi Dan Kemiskinan**

Dalam perkembangan masyarakat masa kini, isu kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari isu perempuan terutama perempuan yang hidup di wilayah pedesaan (Niko, 2019). Kemiskinan merupakan alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan. Mereka memiliki pendidikan yang rendah, serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pun masih sangat terbatas oleh dimensi-dimensi yang menindas mereka, seperti dimensi ekonomi, politik dan budaya.

Ketika suatu kemiskinan sudah dianggap sebuah budaya 'miskin' pada masyarakat pedesaan, tidak terlihat lagi dimana ketimpangan dan ketidakadilan itu. Padahal tampak jelas ketimpangan dan ketidakadilan itu menimpa hampir seluruh perempuan yang hidup di pedesaan. Kekuasaan untuk mengentas kemiskinan dioperasikan melalui pendisiplinan orang miskin menuju peradaban modern, berupa pemukiman menetap maupun penciptaan keluarga inti atau batih (Agusta, 2014).

Kemiskinan di pedesaan berbeda dari kemiskinan di wilayah perkotaan, yang mana di perkotaan kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya keterampilan (*low-skilled*), sedangkan kemiskinan di pedesaan dikarenakan rendahnya sumber daya serta kepemilikan tanah pada sektor pertanian yang tidak merata (Small & Newman, 2001; Sender, 2002). Dengan demikian budaya kemiskinan diperkenalkan kepada seluruh anggota masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak menyadari terdapat sistem

struktural yang dengan sengaja memiskinkan mereka. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi struktural yang selama ini membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan. Sehingga perempuan-perempuan ikut menanggung kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka.

Sebuah keluarga miskin di pedesaan acapkali mampu hidup dengan keterbatasan, mereka melakukan *survive*, baik dalam bentuk uang maupun makanan seadanya. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik adanya pengelompokan disposisi yang berlainan dari kegiatan produksi atau kapitalisme itu terdapat kekuasaan yang beroperasi melalui pengembangan prasangka kultural yang dikembangkan oleh pihak luar.

Perempuan-perempuan ikut menjadi tulang punggung keluarga mereka. Namun pada umumnya sebuah keluarga yang jatuh pada lingkaran kemiskinan sangat sulit untuk bangkit kembali, kecuali apabila memiliki jaringan atau pun pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Pada kasus di Nigeria, Babatunde *et al.* (2012) menyebutkan bahwa sektor pertanian terutama ekspor produk pertanian sangat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Negeria.

Salah satu indikator penyumbang dampak kemiskinan pada perempuan pedesaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu indikator penting untuk menjadi *social modal* bagi perempuan dalam upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun faktanya tingkat pendidikan penduduk di perbatasan Jagoi masih dalam katogori rendah. Dampak dari rendahnya pendidikan ini yaitu kurangnya pengetahuan serta *skill* mereka untuk dapat menciptakan suasana hidup yang lebih baik.

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan kerap kali kita jumpai dalam pemberitaan media terhadap kehidupan perkotaan, seperti pemerkosaan, kasus pelacuran, dan macam-macam. Bukan berarti di pedesaan kasus-kasus tersebut tidak ada, hanya saja jarang terekspose oleh media. Sejarah kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan pedesaan tak akan pernah mungkin usai, karena sudah dianggap demikian adanya, membudaya, bahkan dilanggengkan oleh berbagai macam sistem seperti patriarki, atau sistem adat.

Tubuh perempuan yang mengalami kekerasan seksual di berbagai periode sejarah Indonesia termasuk mereka yang mengalami *trafficking* dan pemaksaan tradisi budaya serta agama, merupakan tubuh-tubuh yang terperangkap (Arivia, 2011). Pada kehidupan pedesaan di perbatasan masyarakat masih memegang teguh sistem adat-istiadat,

sehingga yang muda harus nurut sama yang tua, dan tidak sedikit kasus anak-anak perempuan yang kemudian dibawa ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga, bahkan menjadi pelayan nafsu bagi lelaki hidung belang.

Banyak diantara mereka yang pulang ke kampung halaman dalam keadaan hamil, meski belum cukup umur. Dalam artian mereka hamil di umur yang boleh dikatakan masih belia. Mereka melahirkan tanpa adanya suami. Kemudian setelah melahirkan anak mereka di tinggalkan bersama keluarga yang lain, dan berangkat lagi bekerja ke Malaysia. Banyak kasus yang seperti ini yang sudah merupakan hal biasa. Mereka tidak menyadari bahwa sedang adanya eksploitasi terhadap tubuh mereka sendiri. Minimnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan, serta kemiskinan yang menggiring mereka untuk terjun ke dalam dunia tersebut.

Kasus-kasus *trafficking* menggambarkan ketubuhan yang terperangkap, di satu sisi karena kemiskinan dan di sisi lain karena diri telah terinjak sehingga tidak ada pilihan lain selain kembali menjajakan diri lagi (Arivia, 2011). Dengan kata lain kasus *trafficking* yang terjadi di pedesaan, kemiskinan lah yang menjadi cikal bakal penyebabnya. Karena kemiskinan yang seakan-akan telah membelenggu mereka sehingga mereka pun, seolah-olah secara suka rela untuk mengorbankan diri demi keluarga, atau untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau budaya balas jasa orang tua.

Pembangunan di wilayah perbatasan masih berpijak pada infrastruktur, sementara pembangunan manusia di perbatasan masih belum terjamah. Menurut Shiva (1997) agenda pembangunan yang dirancang elite nasional untuk mengeksploitasi dalam rangka kepentingan nasional, merupakan gaya penjajahan peninggalan kolonialisme. Sementara itu, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menargetkan tujuan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yang mana hal ini sangat berkorelasi pada cita-cita untuk memberantas kemiskinan ekstrem (Bradwshaw, Chant, Linneker: 2017).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan bahwa perempuan pedesaan, terkhusus perempuan yang hidup di wilayah perbatasan Jagoi Babang masih sangat akrab dengan kehidupan miskin serta dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menyangkut eksploitasi. Dalam situasi ini kebijakan *welfare state* di negeri ini masih buram bagi kaum perempuan, dimana mereka masih dihadapkan dengan kenyataan hidup miskin, serba

kekurangan, serta kehidupan yang tidak layak. Konsep kesejahteraan yang ditawarkan negara masih hanya sekedar wacana semata bagi perempuan yang hidup di perbatasan negara. Hal ini menurut Kumurur (2009) bahwa pengentasan dan pemerangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program anti-kemiskinan tanpa disertai dengan perubahan struktur ekonomi untuk memastikan aksesibilitas perempuan sumber-sumber daya.

Kemiskinan sudah mendarah daging dengan kehidupan perempuan di perbatasan, oleh karenanya tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan eksploitasi seperti menjadi TKW ilegal, eksploitasi di sektor tenaga kerja, bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Negara masih belum hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang notabene-nya masih terisolasi. Goodin, (1999, dalam Kurniawan, *et.al.*, 2015) mengungkapkan alasan-alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem negara kesejahteraan: pertama, untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; kedua, untuk mengurangi kemiskinan; ketiga, mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); keempat, mempromosikan integritas sosial atau menghindari eksklusi sosial; kelima, mempromosikan stabilitas sosial; dan keenam, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu. Dalam hal ini penulis melihat bahwa sistem kebijakan yang berbasis negara kesejahteraan (*welfare state*) masih belum dapat terpenuhi bagi penduduk pedesaan di Indonesia, terutama mereka yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

### **Daftar Pustaka**

- Agusta, I. (2014). *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arivia, G. (2011). Merebut Kembali Kendali Tubuh Perempuan. *Jurnal Perempuan*. Edisi 71. Hal. 55-67.
- Babatunde, M. A., et al. Exports Trade, Employment and Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Social Economics*. Vol. 39, No. 11, (2012), Pp. 875-899.
- Bradwshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. Gender and Poverty: what we know, don't know, and need to know for Agenda 2030. *Gender, Place & Culture*. Vol. 24, No. 12, (2017), Pp. 1667-1688.
- Budiantoro, S. *et.al.* (2014). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014*. Jakarta: Prakarsa.

- Diamond, J. (2012). *The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?* Jakarta: Gramedia.
- Kertati, I. Analisis Kemiskinan Kota Semarang berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). *Jurnal Riptek*. Vol. 7, No. 1, (2013), Pp. 27-38.
- Kumurur, V. A. *Pembangunan dan Kemiskinan Perempuan Kota*. Jurnal EKOTON. Vol. 9, No. 1, (2009), Pp. 73-86.
- Kurniawan, L. J. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Niko, N. (2016). *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. Paper was presented on Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Jakarta, Indonesia. Retrieved from: <http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1625>
- Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4(1), 32-37. Doi: DOI: <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.829>
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 6(1), 58-76. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467>
- Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 1(2): 104-114. Doi: <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.65>
- Rahmaniah, S. E. (2014). *Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Kearifan Lokal*. Pontianak: STAIN Press.
- Santoso, D. (2018). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sender, J. Women's Struggle to Escape Rural Poverty in South Africa. *Journal of Agrarian Change*. Vol. 2, No. 1, (2002), Pp. 1-49.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Small, M. L., & Newman, K. Urban Poverty after the Truly Disadvantaged: The Rediscovery of the Family, the Neighborhood, and Culture. *Annual Reviews Sociology*. Vol. 27, (2001), Pp. 23-45.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. No. 4. Pp. 25-42.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.